



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Pangkas Anggota TGUPP

Anggaran Rp 19,8 M Ditinjau Ulang

Gambir, Warta Kota

Badan Anggaran Provinsi DKI Jakarta memangkas alokasi dana Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 mendatang.

Awalnya Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 19,8 miliar untuk menggaji anggota TGUPP sebanyak 67 orang. Namun oleh DPRD DKI Jakarta anggaran itu dipotong menjadi hanya untuk 50 orang saja.

Pemprov DKI akan menghitung kembali jumlah dana yang dibutuhkan, setelah jumlah anggota TGUPP dipangkas.

Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran.

"Dengan mengucapkan Bismillah, TGUPP saya putuskan jadi 50 orang," kata Ketua Banggar DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI pada Senin (9/12) malam.

Dalam kesempatan itu, Prasetio yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta, meminta kepada Ketua TAPD DKI Jakarta Saefullah untuk mengevaluasi kinerja anggota TGUPP.

Mendengar ucapan pimpinan DPRD, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono langsung menginterupsi. Gembong menyebut, jumlah TGUPP mencapai 50 orang masih terlalu banyak. "Makin banyak masukan makin sulit maka sifatnya bukan percepatan nantinya," ujar Gembong.

Prasetio lalu menekankan, keputusan ini diambil karena mempertimbangkan penjelasan dari TAPD DKI Jakarta.

Dia meminta agar fraksi-fraksi yang memandang jumlah tersebut terlalu banyak untuk menghormati keputusan tersebut.

Wakil Ketua Banggar DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengaku setuju dengan putusan Banggar. Kata dia, hal itu diputuskan oleh Ketua Banggar DKI dengan berbagai pertimbangan. "Ini disetujui bersama dan pimpinan sudah memutuskan yang terbaik," kata Taufik.

Polemik keberadaan TGUPP antara eksekutif dan legislatif mulai terjadi saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 beberapa pekan lalu. Legislatif mendesak agar anggaran yang sebesar Rp 19,8 miliar yang diusulkan eksekutif untuk menggaji TGUPP dialihkan memakai dana operasional Gubernur DKI Jakarta. Hal ini berkaca pada pengalaman gubernur sebelumnya, saat itu tunjangan kinerja daerah (TKD) mereka diambil dari dana operasional gubernur.

PDIP tetap menolak

Meski telah diputuskan Banggar, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta keukeuh menolak alokasi dana Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PDI Perjuangan memandang, gaji dan operasional anggota TGUPP yang berjumlah 50 orang di tahun 2020 seharusnya memakai dana operasional gubernur.

"Saya hanya mau review (kaji ulang) rekomendasi Kemendagri. Intinya jelas, karena ini melekat dengan gubernur, silakan pakai dana operasional gubernur saja," kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono.

Dalam rapat Banggar, Senin malam itu, Gembong menyampaikan kekecewaannya terhadap putusan Banggar yang hanya memangkas alokasi dana TGUPP yang awalnya untuk 67 orang menjadi 50 orang pada 2020 mendatang. Gembong mengatakan, seharusnya jumlah itu dibalik. Artinya 50 orang dipangkas, dan gaji hanya diberikan kepada 17 orang TGUPP saja. "Intinya kami tetap menolak, tolong diberi catatan PDI Perjuangan menolak persetujuan itu," ujar Gembong.

Pertanyakan kinerja

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Viani Limardi mempertanyakan kinerja TGUPP selama ini. Sepengetahuan dia, peran dan tugas TGUPP sebetulnya mempercepat pembangunan melalui masukan saran kepada gubernur.

Akan tetapi fakta yang ditemukan lain. Masyarakat yang melapor keluhan ke Fraksi PSI selama ini menyampaikan hal yang bertolak belakang.

Keluhan yang mereka sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta justru tidak direspon. "Mereka banyak yang sudah melapor, bahkan mengirim surat dan lain-lain, tetapi berbulan-bulan bahkan sampai hari ini banyak sekali yang belum direspon," kata Viani.

Kata dia, sejak dua tahun lalu polemik mengenai kinerja TGUPP selalu terjadi saat rancangan anggaran di Banggar DKI. "Karena sudah dua tahun ribut terus soal anggaran, seharusnya TGUPP ini sudah bersiap tahun ini melalui kajiannya, laporannya, dan kinerjanya. Tujuannya biar bisa dilihat oleh teman dewan. Setelah itu akan kami timbang apakah pantas atau tidak dianggarkan lagi," ujar Viani.

Tak bisa intervensi

Sementara itu Gubernur

DKI Jakarta Anies Baswedan mengisyaratkan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak bisa mengintervensi Peraturan Gubernur (Pergub) yang dibuat oleh kepala daerah, yang menjadi dasar TGUPP.

Pasalnya, Pergub merupakan produk hukum yang dibuat kepala daerah. Berbeda bila payung hukumnya berupa Peraturan Daerah (Perda) karena melibatkan legislatif.

Selama ini pembentukan TGUPP mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2019 tentang TGUPP.

Hal itu dikatakan Anies saat diminta tanggapannya mengenai Keputusan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang memangkas jumlah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 67 orang menjadi 50 orang pada 2020 mendatang.

"Soal itu kan keputusannya (jumlah TGUPP) lewat Pergub. Ya sudah Anda simpulkan sendiri saja dah, nggak usah pakai (pernyataan) saya," ujar Anies usai Pengukuhan Duta Anti Korupsi dan Peluncuran Bus Kampanye Anti Korupsi di Balai Kota DKI, Selasa (10/12).

Dalam kesempatan itu, Anies juga enggan berkomentar lebih lanjut soal pemangkasan jumlah anggota TGUPP. Padahal pemangkasan ini tentunya juga berdampak pada usulan anggaran yang diajukan eksekutif sebesar Rp 19,8 miliar.

Namun hingga kemarin anggarannya belum ditentukan karena DKI akan kembali menyesuaikan nilainya dengan jumlah TGUPP yang berkurang dari 67 orang menjadi 50 orang. "Saya nggak mau berdebat itu dah," kata Anies.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Pangkas Anggota TGUPP

Kinerja dirasakan

Menanggapi kritikan dan pertanyaan dari banyak pihak, termasuk dari DPRD, tentang kinerja TGUPP, Anies dengan santai menyatakan, keberadaan TGUPP semakin dikritik justru kinerjanya semakin dirasakan masyarakat.

"TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu buat saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerja TGUPP itu makin dirasakan," ujar Anies di Stasiun Mass Rapi Transit (MRT) Dukuh Atas, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat pada Selasa (10/12).

Oleh karena itulah, kata Anies, pihak oposisi dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan dan PSI begitu keras menolak keberadaan TGUPP. Anies mengklaim selama ini TGUPP sangat efektif bekerja supaya program-program gubernur berhasil bagi masyarakat.

"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya kemudian pantauannya. Itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov DKI berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," kata Anies. **(fat)**

Ketua TGUPP Mundur

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bidang Pengelolaan Pesisir, Marco Kusumawijaya, mengundurkan diri dari jabatannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti mengatakan, Marco mengundurkan diri sejak 1 Desember 2019 lalu. Marco kini sudah tidak lagi bergabung dalam tim bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

"Iya (sudah bukan TGUPP), sudah mengundurkan diri sejak 1 Desember," ujar Suharti saat dihubungi, Selasa (10/12).

Suharti menuturkan, Marco menyatakan ingin fokus menulis buku. "Info beliau ke saya, akan fokus nulis buku," kata Suharti. **(Kompas.com)**